

# FKPKN

*Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara*

## TRIWULAN II TAHUN 2023

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

*new DJPb  
in Town*

# KATA PENGANTAR

## **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dapat menyusun Laporan kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) secara tepat waktu.

Laporan kegiatan FKPKN ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Treasury, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada Satuan Kerja mitra Kanwil DJPb, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi dan unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana untuk menyediakan informasi kegiatan-kegiatan terkait fiskal dan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

## **Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jambi, 11 Juli 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Burhani AS



**Burhani AS**

Kepala Kantor Wilayah DJPb  
Provinsi Jambi



# Tim Penyusun

## Pengarah

Burhani AS

## Ketua

Fauzi Syafriel

## Penyusun

Bernand Situmorang

Lilik Kurniawan

Rr. Raina Avissa Dione Belindasari





# Daftar Isi

Kata Pengantar	<b>i</b>
Tim Penyusun	<b>ii</b>
Daftar Isi	<b>iii</b>
Executive Summary	<b>iv</b>
Latar Belakang	<b>1</b>
Identifikasi Masalah	<b>2</b>
Pelaksanaan Kegiatan Periodik	<b>4</b>
Pelaksanaan Kegiatan Strategis/Tematik	<b>32</b>
Pelaksanaan Kegiatan Local Expert	<b>49</b>
Kesimpulan dan Rekomendasi	<b>52</b>

# EXECUTIVE SUMMARY

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) tingkat daerah secara aktif berkolaborasi dan bersinergi baik dengan Kemenkeu Satu, berbagai tim/forum daerah, pimpinan pemerintah daerah, dan *local expert* melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta arahan dan rekomendasi sebagai wujud peran Kanwil DJPb dalam membantu penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat terhadap masyarakat.

Selama periode triwulan II tahun 2023, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan sebanyak 17 kegiatan periodik, 13 kegiatan strategis/tematik yang terdiri atas 10 kegiatan strategis dan 3 kegiatan tematik, serta 1 kegiatan yang melibatkan *local expert* dengan rincian sebagai berikut.

## **1. Kegiatan Periodik**

Kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi maupun unit vertikal yang telah dilaksanakan diantaranya *Joint Monitoring* dan *Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2023* pada Pemerintah Provinsi Jambi, *Audiensi* dengan Bupati Tebo, *Audiensi* dengan Bupati Bungo, *Audiensi* dengan Bupati Merangin, *Audiensi* dengan Bupati Sarolangun, *Identifikasi Peluang Investasi Daerah* di Pemda Kabupaten Bungo, *Koordinasi Pelaksanaan Asistensi BLUD* di Kabupaten Bungo, *Identifikasi Peluang Investasi Daerah* di Pemda Kabupaten Tebo, *Koordinasi Pelaksanaan Asistensi BLUD* di Kabupaten Tebo, *Workshop Pelaksanaan Anggaran*, *Sinergi Pemberdayaan UMKM* dengan BLU PIP melalui *Kunjungan/Pendampingan* pada DTKK Kota Jambi dan *Koperasi Al-Ishlah*, serta *Rangkaian Rapat ALCo Regional Teknis*, *Deputies*, dan *Komite* periode Maret dan April Tahun 2023.

## **2. Kegiatan Strategis/Tematik**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai upaya untuk menunjang bahasan tematik *Kajian Fiskal Regional* dan *ALCo Regional* diantaranya *Sosialisasi BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape*, *Rapat Peningkatan Kapasitas*

Pajak Daerah dalam Kerangka Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara, dan Monev dan Pembinaan BLU Provinsi Jambi. Sementara itu, kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan keterlibatan berbagai tim atau forum daerah diantaranya Musrenbang RKPD Provinsi Jambi, Forum Silaturahmi Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekretariat Stunting Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan Implementasi SIMGAJI Web dan Rekonsiliasi Data serta. Iuran IWP 8% JKK dan JKM PNS, PPPK, dan Pejabat Negara Caturwulan I Tahun 2023. Di samping itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan pimpinan daerah wilayah Provinsi Jambi diantaranya dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Bupati Tanjung Jabung Barat, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Direktur Pemasaran Bank 9 Jambi.

### **3. Kegiatan *Local Expert***

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan *local expert* Provinsi Jambi berupa *Focus Group Discussion* (FGD) Diseminasi Fiskal Regional dengan Tema Penguatan *Local Taxing Power* sesuai Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



FKPKN 🌟 TRIWULAN II 2023 🌟 KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# LATAR BELAKANG

## LATAR BELAKANG

Tahun 2023, merupakan tahun keempat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ekonomi global dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah serius. Kekhawatiran akan resesi merebak seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meroketnya inflasi di berbagai negara, dan peningkatan suku bunga global. Padahal, sampai dengan tahun 2023 ini luka-luka pandemi belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi.

Tahun ini penuh tantangan dalam mengelola keuangan negara karena masih dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 dan isu geopolitik serta menjadi tahun dimana batas maksimal defisit anggaran kembali ke angka 3%. Untuk menghadapi hal tersebut, pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, terkait penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), seluruh elemennya pada tahun ini disalurkan melalui KPPN di daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat tahun sebelumnya, tidak seluruh elemen TKD disalurkan KPPN di daerah.

Keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) walaupun belum lama keberadaannya, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Adapun dana APBN yang dikelola di wilayah Jambi mencapai Rp20,49 Triliun, yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp6,57 Triliun dan TKD sebesar Rp13,92 Triliun. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya FKPKN, kesadaran untuk bersinergi semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan antusiasme terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPKN.

Permasalahan yang berulang setiap tahun anggaran masih saja terjadi. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang belum berkualitas. Dengan sinergi dan berkolaborasi, diharapkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara mampu menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu pembangunan regional. Tidak terbatas pada pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun juga dapat memberikan dukungan nyata di level ekonomi regional kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menumpuknya pencairan dana di akhir tahun masih saja terjadi di tahun 2022 walaupun intensitasnya semakin menurun. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian pimpinan sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan pelaksanaan anggaran terus menerus diadakan sejak triwulan II dalam rangka edukasi dengan harapan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan anggaran.

Dari berbagai dinamika dalam pengelolaan fiskal di daerah dan pengelolaan keuangan negara di daerah pada khususnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sinergi antar unit terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kualitas yang lebih baik.



FKPKN ✨ TRIWULAN II 2023 ✨ KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# IDENTIFIKASI MASALAH

## IDENTIFIKASI MASALAH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Treasury, Regional Chief Economist (RCE)*, dan *Financial Advisor* dalam Triwulan II tahun 2023 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. Akselerasi penyaluran TKD merupakan tantangan tersendiri mengingat mulai tahun 2023, semua elemen TKD disalurkan melalui KPPN di daerah.
2. Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.
3. Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.
4. Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indikator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output
5. Penguatan dan Kerjasama dengan pihak Eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi.
6. Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.

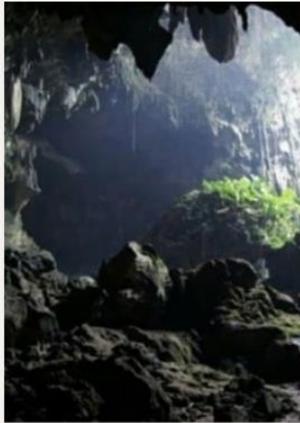
Adapun terkait isu/permasalahan yang ada di Kanwil DJPb Jambi dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Isu/Permasalahan	Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut/ Kanwil DJPb/ Kanwil Kemenkeu
1.	Perlunya untuk meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD seperti Bimbingan Laporan Keuangan, Pembinaan Satker, Koordinasi Pelaksanaan Asistensi BLUD, <i>Joint Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD</i> , dan Identifikasi Peluang Investasi di Daerah
2.	Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dalam pembiayaan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM dengan BLU PIP melalui Kunjungan/

		Pendampingan pada DTKK Kota Jambi dan Koperasi Al-Ishlah
3.	Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu seperti Rapat ALCO Regional Tingkat Teknis, Deputies dan Komite setiap bulannya serta Rapat FKPKN setiap semester.
4.	Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indicator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan seperti Bimbingan laporan keuangan, Audiensi dengan Pimpinan Daerah, dan <i>Workshop</i> Pelaksanaan Anggaran.
5.	Penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara ( <i>local expert</i> ) di wilayah Provinsi Jambi.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti mengundang <i>local expert</i> pada acara FGD Diseminasi Fiskal Regional dengan tema “Penguatan <i>Local Taxing Power</i> sesuai Implementasi UU No. 1 Tahun 2022”
6.	Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.	Kepala Kanwil beserta jajarannya berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Musrenbang RKPD, Forum Silaturahmi Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekretariat Stunting Provinsi Jambi, dan Rapat Koordinasi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.
7.	Peran sebagai <i>Financial Advisor</i> adalah peran strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dan mewujudkan BLU yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada efisiensi dan produktivitas. Sehingga koordinasi dan pendampingan terhadap satuan kerja terkait perlu dilaksanakan dari <i>high level</i> hingga tingkat teknis.	Kanwil melaksanakan Monev dan Pembinaan BLU dan Kepala Kanwil beserta jajarannya berkoordinasi aktif dengan satuan kerja seperti Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi, Kemenag.
8.	Perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah/ Pimpinan Lembaga terkait supaya peran Kanwil sebagai <i>Treasury. Financial Advisor</i> , dan <i>Regional</i>	Kepala Kanwil berkoordinasi aktif dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala BI



	<p><i>Chief Economist</i> dapat memberi dampak bagi masyarakat seperti pemulihan ekonomi dimana APBN yang memiliki peran dalam memantik pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Jambi, dan Bupati dalam wilayah Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kemenkeu di Jambi.</p>
--	--	---



FKPKN 🌟 TRIWULAN II 2023 🌟 KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

## PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

### 1. **JOINT MONITORING DAN EVALUASI REALISASI APBD TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

#### a. **Waktu dan Tempat**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Mei 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.

#### b. **Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Perwakilan dari DJPK, dengan BPKPD Provinsi Jambi.

#### c. **Rincian Kegiatan**

Pelaksanaan *Joint Monitoring dan Evaluasi APBD* pada Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini BPKPD Provinsi Jambi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya realisasi belanja pada APBD karena dinilai masih memiliki kinerja serapan belanja APBD belum optimal, yaitu kinerja realisasi belanja APBD masih rendah dan rasio dana di perbankkan terhadap volume APBD relatif tinggi.

Berdasarkan kegiatan tersebut, didapati bahwa masih terdapat kendala dalam aplikasi keuangan di Pemda karena Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya masih menggunakan SIMDA. Berkaitan dengan realisasi APBD dari sisi pendapatan masih *on progress* sehingga *money idle* masih tinggi dan masih belum ada progress dari dana transfer yang disebabkan antara lain:

- Masih adanya *review* dari Inspektorat terkait DAK Fisik berupa infrastruktur
- Berkaitan dengan DAU *earmarked* PPPK sejumlah Rp68 M, untuk proses perekrutan formasi PPPK tahun 2022 berjumlah 140 formasi belum ada SK dari BKD. Sedangkan untuk proses perekrutan tahun 2023 belum bisa menyesuaikan dengan PMK 212 yang disebutkan bahwa formasi PPPK harus sejumlah 5.900-an. Apabila tetap mengikuti formasi PMK 212, maka di tahun 2024 akan membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp213 M yang setelah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Sementara itu, dari sisi belanja APBD realisasi masih sangat rendah yaitu di bawah 30% karena adanya kendala diantaranya:

- Permohonan SPM uang muka untuk DAK Fisik belum diakomodir karena belum masuknya dana transfer tahap pertama



- Masih menunggu laporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan di tahun 2022 yang belum sepenuhnya terserap sebesar kurang lebih Rp200 M dari Dinas Teknis. Di samping itu, Pemda saat ini sedang melakukan revisi Perkada supaya sisa penggunaan Dana Bantuan Keuangan tahun sebelumnya bisa digunakan untuk tahun berikutnya
- Penyaluran Hibah dan Bansos masih dilakukan persiapan syarat administrasi salah satunya berupa SK dan validasi penerima oleh SKPD
- Berkaitan dengan uang muka pekerjaan dan kegiatan yang dananya tidak bersumber dari DAK, kecenderungan di Provinsi Jambi bahwa pihak ketiga tidak mengambil uang muka sehingga dari Pemda sudah menginisiasi agar pihak ketiga dapat mengambil 30% terlebih dahulu
- Pembiayaan terbesar terdapat pada Penyertaan Modal sebesar Rp90-an M yang rencananya paling lambat bulan Juni bisa tersalurkan
- Masih terdapat satu komposisi yang mempengaruhi *money idle* berupa uang dari pihak luar yang tidak diketahui kepemilikannya yang tersimpan di Kasda sebesar Rp42 M yang setelah ditelusuri adalah milik PT. WKS. Hal tersebut awalnya terjadi karena PT. WKS mendapat izin prinsip untuk melakukan pembukaan lahan yang pada saat itu terdapat laporan dari LSM bahwa PT tersebut merambah utang dan terdapat penetapan ganti rugi yang tidak sesuai dengan prosedur di 2014. Namun sejak 2014 hingga sekarang tidak terbit putusan dari pengadilan sehingga menjadi temuan BPK bahwa setoran tersebut diyakini tidak sesuai dengan peraturan dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan.

Dari sisi penerimaan, didapati bahwa penerimaan yang kurang optimal di tahun sebelumnya hanya Pajak Air Permukaan (PAP) karena kendalanya di Pemda masih menunggu Nilai Perolehan Air (NPA) yang ditetapkan oleh Kementerian PU sehingga Pemerintah Provinsi Jambi masih menggunakan NPA lama yang nilainya lebih kecil dan meskipun selisihnya tidak jauh namun berpengaruh cukup signifikan terhadap proyeksi realisasi.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Sebagai strategi ke depannya, Pemerintah Provinsi Jambi akan menggunakan Aplikasi SIPD sebagai *mirror* dengan penggunaan aplikasi utama yaitu Aplikasi SIMDA supaya *progress* keuangan dapat langsung terkoneksi dengan Kementerian Keuangan.
- 2) TDF telah disalurkan sebanyak 50% untuk salah satunya kebutuhan pencairan THR, sementara 50% lainnya akan disalurkan dengan menunggu pengajuan dari Pemda
- 3) DAK Fisik pada dasarnya adalah *by proposal-based* yang sebenarnya sudah berproses lama sehingga seharusnya Pemda sudah terinformasi dan Juknis hanya masalah penetapan saja
- 4) Mempertimbangkan kontinuitas anggaran di tahun 2024 dan tren kenaikan DAU selama 3 tahun terakhir (rata-rata 3,8%) serta melalui konsultasi bersama Kementerian Keuangan, total maksimal penerima DAU *earmarked* P3K pada Pemerintah Provinsi Jambi hanya sebesar 2000 formasi

**2. AUDIENSI DENGAN BUPATI TEBO**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2023 pada pukul 16.00 hingga 17.30 WIB bertempat di Rumah Dinas Bupati Tebo.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Tebo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, Kepala KPPN Muara Bungo, Kepala Bidang PPA II, Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pelaksana lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta staf perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan audiensi dilakukan dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Tebo serta melakukan konfirmasi keberlangsungan sinkronisasi pelaporan LRA Pemda dengan aplikasi SIKD Kementerian Keuangan yang digunakan dalam mendukung peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief of Economist*.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas mengenai penyaluran TKD, TDF, KUR, dan UMi Kabupaten Tebo beserta kendala yang dialami dalam penyaluran. Dalam pemenuhan tugas DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan *Financial Advisor* (FA), Kanwil DJPb juga akan melakukan pembinaan akuntansi dan pelaksanaan anggaran daerah dengan berkunjung langsung ke OPD. Audiensi ditutup dengan penyerahan plakat kepada dan oleh Pj. Bupati Tebo sebagai kenang-kenangan atas kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi ke Kabupaten Tebo.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audiensi dengan Pj. Bupati Tebo, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TKDD di Kabupaten Tebo sudah tersalur sebesar 308,29 M atau 32,39% dari pagu 951,84 M. Adapun dana tersebut yaitu Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Desa. Sedangkan untuk DAK Fisik dan DAU specific grant belum terealisasi. Hal ini dikarenakan beberapa masih dalam tahap perencanaan.

- 2) Pemerintah Kabupaten Tebo bersedia untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan KPPN Muara Bungo terkait pengembangan UMKM di Desa Giri Purno.
- 3) Bupati Tebo telah menghimbau kepada seluruh OPD untuk secara aktif mencari peluang dalam rangka pengembangan Kabupaten Tebo dalam hal ini dapat bekerja sama dengan KPPN Muara Bungo maupun Kanwil DJPb Provinsi Jambi.
- 4) Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tebo. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

### **3. AUDIENSI DENGAN BUPATI BUNGO**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023 pada pukul 09.00 hingga 10.30 WIB bertempat di Rumah Dinas Bupati Bungo.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Kepala KPPN Muara Bungo, Kepala Bidang PPA II, Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pelaksana lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta staf perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan audiensi dilakukan dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Tebo serta melakukan konfirmasi keberlangsungan sinkronisasi pelaporan LRA Pemda dengan aplikasi SIKD Kementerian Keuangan yang digunakan dalam mendukung peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief of Economist*.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas mengenai penyaluran TKD dan TDF Kabupaten Bungo beserta kendala yang dialami dalam penyaluran. Dalam audiensi tersebut dibahas pula mengenai sektor ekonomi, komoditi utama, dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bungo. Berkaitan dengan pembangunan jalan tol Palembang-Jambi-Riau, koridor terletak di Damsraya yang berjarak kurang lebih 2 jam dari Kabupaten Bungo yang dapat berdampak pada menurunnya mobilitas Kabupaten Bungo, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dilaksanakan pengaktifan kembali Bandara Bungo yang akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Audiensi ditutup dengan penyerahan plakat kepada dan oleh Bupati Bungo sebagai kenang-kenangan atas kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi ke Kabupaten Bungo.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audiensi dengan Bupati Bungo, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TKDD di Kabupaten Bungo sudah tersalur sebesar 300,35 M atau 29,66% dari pagu 1.012,82 M. DAK Fisik dan DAU *specific grant* belum terealisasi di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo diharapkan dapat melengkapi dokumen persyaratan agar dana dapat segera disalurkan.

- 2) Pimpinan daerah diharapkan dapat mendukung implementasi SP2D *online*, sehingga pemotong pajak dapat dilakukan secara *real time*. Hal ini dapat berdampak pada penghitungan DBH Pajak.
- 3) Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama dengan KPPN Muara Bungo mendukung dalam penyaluran dana APBN dan bersedia membantu melalui pembinaan-pembinaan apabila diperlukan.
- 4) Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

#### **4. AUDIENSI DENGAN BUPATI MERANGIN**

##### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pada pukul 09.00 hingga 10.30 WIB bertempat di Kantor Bupati Merangin.

##### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Merangin, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin, Kepala KPPN Bangko, Kepala Bidang PPA II, Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pelaksana lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta staf perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Merangin.

##### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan audiensi dilakukan dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Merangin serta melakukan konfirmasi keberlangsungan sinkronisasi pelaporan LRA Pemda dengan aplikasi SIKD Kementerian Keuangan yang digunakan dalam mendukung peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief of Economist*.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas mengenai penyaluran TKD, TDF, KUR, dan UMi Kabupaten Merangin beserta kendala yang dialami dalam penyaluran. Diperlukan adanya pengawasan terkait penyaluran Dana Desa agar tidak dipolitisasi selama masa Pilkada. Audiensi ditutup dengan

penyerahan plakat kepada dan oleh Pj. Bupati Merangin sebagai kenang-kenangan atas kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi ke Kabupaten Merangin.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audiensi dengan Pj. Bupati Merangin, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TKDD di Kabupaten Merangin sudah tersalur sebesar 355,9 M atau 30,67% dari pagu 1.160,26 M. Adapun DAU *specific grant* belum terealisasi di Kabupaten Merangin.
- 2) Terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran karena adanya realokasi anggaran kebijakan pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa yang belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan.
- 3) Pj. Bupati Merangin dan seluruh OPD bersedia mendukung dan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Bangko dalam kelancaran penyaluran dana transfer dan pelaksanaan program-program pemerintah.
- 4) Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan – kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

### 5. AUDIENSI DENGAN BUPATI SAROLANGUN

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2023 pada pukul 10.00 hingga 11.00 WIB bertempat di Kantor Bupati Sarolangun.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Sarolangun, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, Kepala KPPN Bangko, Kepala Bidang PPA II, Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pelaksana lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta staf perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan audiensi dilakukan dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Merangin serta melakukan konfirmasi keberlangsungan sinkronisasi pelaporan LRA Pemda dengan aplikasi SIKD Kementerian Keuangan yang digunakan dalam mendukung peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief of Economist*.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas mengenai penyaluran TKD, TDF, KUR, dan UMi Kabupaten Sarolangun beserta kendala yang dialami dalam penyaluran. Diperlukan adanya pengawasan terkait penyaluran Dana Desa agar tidak dipolitisasi selama masa Pilkada. Audiensi ditutup dengan penyerahan plakat kepada dan oleh Pj. Bupati Sarolangun sebagai kenang-kenangan atas kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi ke Kabupaten Sarolangun.





**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audiensi dengan Pj. Bupati Sarolangun, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TKDD di Kabupaten Sarolangun sudah tersalur sebesar 336,54 M atau 32,35% dari pagu 1.040,21 M. DAK Fisik dan DAU *specific grant* belum terealisasi di Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat melengkapi dokumen persyaratan agar dana dapat segera disalurkan.
- 2) Bupati Sarolangun menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Bangko terkait penyaluran dana transfer agar dana dapat cepat tersalur dan terserap sehingga sektor riil dapat bergerak.
- 3) Bupati Sarolangun mendukung secara penuh pelaksanaan program – program pemerintah dan bersedia bekerja sama dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Bangko.
- 4) Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan – kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

**6. IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI DAERAH DI PEMDA KABUPATEN BUNGO**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Angrek Kantor Bappeda Kabupaten Muara Bungo.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda serta beberapa staf dan beberapa Kabid dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Kepala Bidang PPA II, dan Kepala Seksi PPA II B beserta staf dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan penyusunan Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk berdiskusi terkait iklim investasi untuk dapat menganalisa potensi sumber daya baik sektoral, komoditas unggulan, maupun atas proyek Pemerintah Daerah yang sedang dan akan dikembangkan dan berpotensi untuk dibiayai melalui pinjaman daerah.

Agenda diawali dengan paparan oleh Kepala Seksi PPA II B terkait Investasi di Daerah dengan menyampaikan bahwa Pemerintah daerah memiliki visi untuk melakukan pembangunan daerah dan hal tersebut membutuhkan pembiayaan, sedangkan kapasitas fiskal di Muara Bungo masih rendah. Apabila dari sisi pendapatan, 81% dana berasal dari transfer ke daerah. Beranjak dari keterbatasan fiskal yang ada, terdapat peluang daerah untuk menutupi pembiayaan yang dapat bersumber dari pinjaman (Pemerintah, LKB/LKBB, Pemda Lain, dan Obligasi/Sukuk) atau investasi (Pemerintah, Swasta, dan *Partnership*). Berdasarkan perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Kabupaten Bungo salah satu Pemda yang memiliki kapasitas pembiayaan yang besar dibanding Pemerintah Daerah lainnya sehingga berpotensi untuk menyerap pinjaman sebagai alternatif pendanaan untuk pembangunan daerah.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bidang Ekonomi Bappeda yang menyampaikan terkait kondisi Kabupaten Bungo serta sektor unggulan dari Kabupaten Bungo Disampaikan juga beberapa hal oleh Kepala Bidang Promosi Pengembangan DMPTSP terkait pendataan mengenai peluang investasi dan terkait promosi investasi di Bungo.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Beberapa skema pembiayaan sudah mulai dikaji oleh Pemda, beberapa tahun yang lalu telah membentuk tim terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan

- Badan Usaha (KPBU) dengan proyek revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional dan sudah melaksanakan virtual meeting dengan Kemenkeu. Namun, pada akhirnya Pemda menunda pelaksanaan KPBU.
- 2) Sektor unggulan dari Kabupaten Bungo adalah sektor perkebunan dan pertanian. Terdapat Bandar Udara Muara Bungo namun jumlah penerbangannya masih sangat minim dan atas hal tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan maskapai Transnusa. Terkait dengan pertambangan, beberapa waktu yang lalu AKASI mengundang Bupati Bungo untuk menyampaikan peluang investasi karena Bungo dianggap potensial.
  - 3) Kabupaten Bungo setiap tahun melakukan pendataan mengenai peluang investasi. Di sektor perkebunan ada sawit dan karet, untuk pertanian yaitu padi, jagung. Berdasarkan pelatihan bersama Provinsi, Bungo cenderung ke bidang pertanian. Namun, hal tersebut belum dilakukan pengkajian lebih lanjut. Sementara itu, produksi sawit sangat tinggi sehingga pabrik CPO di Bungo bisa menjadi peluang investasi.
  - 4) DMPTSP di Provinsi Jambi mengusulkan penggemukan sapi dan perikanan (patin dan lele) perlu kajian yang lebih dalam lagi.
  - 5) Terkait promosi investasi di Bungo, apabila dilakukan promosi dalam pameran, investor kurang tertarik sehingga kedepannya akan dilakukan promosi dalam bentuk studi kelayakan.

## **7. KOORDINASI PELAKSANAAN ASISTENSI BLUD DI KABUPATEN BUNGO**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Bungo.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kabag Perekonomian Kabupaten Muara Bungo, Kabag Keuangan RSUD H. Hanafie, dan Kepala Seksi PPA II C beserta staf dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui kondisi dan tata kelola BLUD di Kabupaten Bungo serta mengetahui jenis pembinaan BLUD yang telah dilaksanakan oleh Pemda dan pelaksanaan koordinasi rencana asistensi BLUD yang akan dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi PPA II C yang menyampaikan bahwa pelaksanaan asistensi BLUD merupakan inisiasi baru dari DJPb. Disampaikan juga terkait permasalahan tata kelola BLUD di daerah dan Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan memotret kondisi BLUD di Kabupaten Muara Bungo.

Setelahnya Kabag Perekonomian Kabupaten Muara Bungo menyampaikan beberapa hal terkait Peraturan Bupati pendukung pelaksanaan tata kelola BLUD dan *progress* RTRW Kabupaten. Kabag Keuangan RSUD H. Hanafie menyampaikan realisasi anggaran RSUD dan perkembangan dari perbaikan fasilitas yang disediakan RSUD.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi asistensi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Beberapa permasalahan terkait tata kelola BLUD di daerah diantaranya:
  - a) Belum tersedianya panduan teknis tata kelola BLUD di daerah;
  - b) SDM pengelola yang belum mumpuni dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan BLUD;
  - c) Koordinasi antara BLUD dengan pembina teknis dan pembina keuangan yang masih kurang.
- 2) Peraturan Bupati pendukung pelaksanaan tata Kelola BLUD di Kabupaten Muaro Jambi belum selesai ditetapkan, saat ini masih di proses di Biro Hukum;
- 3) Terkait dengan RTRW kabupaten sedang dilakukan *finishing*/penyempurnaan dikarenakan RTRW yang lama masih banyak kendala;
- 4) Pembinaan oleh Biro Perekonomian intens dilakukan bersama dengan puskesmas mulai dari usulan pembentukan, dinilai, penetapan, dan penyusunan Perbup tata kelola, pengelolaan keuangan, dan penyusunan Renstra sedang berproses;

- 5) Kabupaten Muara Bungo pernah bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan keuangan bersama dengan kepala puskesmas. Puskesmas tidak memiliki tenaga akuntan namun diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang komprehensif;
- 6) Di tahun 2022, pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie terealisasi hampir 75 M. RSUD mendapatkan dana DAK yang banyak digunakan untuk belanja modal dan pendapatan tersebut dipisahkan dari pendapatan BLUD. Sementara DAK tahun 2023 masih dalam proses pencairan;
- 7) Pembukuan RSUD H. Hanafie telah memakai *billing system* dengan pihak ketiga;
- 8) Selain pelayanan BPJS, RSUD juga menyiapkan pelayanan nonBPJS. Di samping itu, saat ini sedang gencarnya diberikan pendidikan dokter untuk menjadi sup spesialis, yaitu dokter spesialis yang telah menyelesaikan program *fellowship* dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari Kolegium pengampu cabang keilmuan terkait.

## **8. IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI DAERAH DI PEMDA KABUPATEN TEBO**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Sigombak Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Analis Kebijakan Ahli Muda, beberapa Kepala Bidang dari DPMPSTP dan beberapa Kepala Bidang dari Bappeda, Kepala Bidang PPA II, dan Kepala Seksi PPA II B beserta staf dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan penyusunan Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk berdiskusi terkait iklim investasi untuk dapat menganalisa potensi sumber daya baik sektoral, komoditas unggulan, maupun atas proyek Pemerintah Daerah yang sedang dan akan dikembangkan dan berpotensi untuk dibiayai melalui pinjaman daerah serta terkait pembiayaan yang saat ini masih *on going* dilakukan pembayaran pokok dan bunga dari pemotongan DAU dari pinjaman PEN.

Agenda diawali dengan paparan oleh Kepala Seksi PPA II B terkait Investasi di Daerah dengan menyampaikan bahwa Tebo merupakan daerah yang memiliki

pengalaman terkait melakukan pinjaman sehingga Tebo sudah memiliki proyek-proyek potensial yang diberikan pinjaman. Selain itu, Pemda memiliki keterbatasan dalam pembiayaan baik dari PAD ataupun transfer, sehingga memungkinkan apabila ada proyek potensial untuk dikembangkan, dapat dilakukan melalui pembiayaan

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda yang menyampaikan terkait sektor unggulan dari Kabupaten Tebo dan dilanjutkan dengan penyampaian dari Kadis DPMPTSP KUKM terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Tebo.



#### **d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Kontribusi tertinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo adalah sektor pertanian dan perkebunan dimana PDRB lebih dari separuh terbentuk dari sektor pertanian dan perkebunan (sawit);
- 2) Kabupaten Tebo Ingin mendorong tumbuhnya hilirisasi dengan saat ini terdapat 9 pabrik pengolahan CPO yang terdiri dari 2 pabrik non kebun dan yang 7 pabrik bermitra;
- 3) Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Tebo merupakan daerah transit yang strategis karena merupakan perlintasan dari Jakarta-Sumbar. Sementara Potensi yang dimiliki Kabupaten Tebo masih berbasis sektor pertanian (sawit dan karet) dengan kontribusi tinggi namun laju pertumbuhannya lambat. Di sisi lain, sektor pertambangan memiliki kontribusi yang kecil namun pertumbuhannya tinggi, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan mampu tumbuh dari 8% menjadi 9%;
- 4) Terkait peluang investasi Kabupaten Tebo 2023 adalah mengenai industri minyak goreng kelapa sawit. Kajian awal telah disusun, namun masih berupa kajian/analisis yang disusun sendiri oleh DPMPTSP;

- 5) Sektor potensial lainnya di Kabupaten Tebo adalah Sektor Peternakan dan Industri Olahan Kayu Karet. Kemudian, didapati bahwa ada Candi Tuo Sumay yang menurut sejarah lebih tua dari Candi Muara Jambi. Saat ini situsnya belum digali karena masih berada di permukiman warga. Mulai tahun ini sedang penelitian bersama dengan Universitas Indonesia untuk menghubungkan satu alur sejarahnya.

## **9. KOORDINASI PELAKSANAAN ASISTENSI BLUD DI KABUPATEN TEBO**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Mei bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Asisten Pemerintahan Kabupaten Tebo, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo, Bakeuda Kabupaten Tebo, Kanwil DJPb Provinsi Jambi yaitu Kepala Bidang PPA II, Kepala Seksi PPA II C beserta staf dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui kondisi dan tata kelola BLUD di Kabupaten Tebo serta mengetahui jenis pembinaan BLUD yang telah dilaksanakan oleh Pemda dan pelaksanaan koordinasi rencana asistensi BLUD yang akan dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi PPA II C yang menyampaikan bahwa di tahun 2022, terdapat 133 BLUD di Provinsi Jambi dengan total pendapatan kurang lebih Rp400an M. Disampaikan juga terkait permasalahan tata kelola BLUD di daerah dan Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan memotret kondisi BLUD di Kabupaten Muara Bungo.

Setelahnya dilakukan diskusi dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Tebo, RSUD Sultan Tjaja Saifuddin Tebo, Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Tebo, dan Bakeuda Kabupaten Tebo yang membahas beberapa hal terkait regulasi maupun tantangan dalam pengelolaan BLUD.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi asistensi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Beberapa permasalahan terkait tata kelola BLUD di daerah diantaranya belum adanya peraturan yang memadai, SDM belum mumpuni, anggaran terbatas dalam rangka pelaksanaan BLUD dan koordinasi yang belum optimal antara pembina BLUD dengan OPD terkait;
- 2) Pengelolaan keuangan di puskesmas masih tergabung dengan Dinas Kesehatan dan saat ini sedang ada penyempurnaan peraturan terkait dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sehingga ada payung hukum dalam pelaksanaannya;
- 3) Terkadang terjadi bentrokan peraturan terkait dengan tata kelola RSUD, sehingga banyak aturan yang perlu disesuaikan serta harus ada kesamaan persepsi antara pelaksanaan teknis di RSUD dan pemerintahan di pemda sehingga tidak menyebabkan kendala pelaksanaan BLUD RSUD;
- 4) Penetapan Puskesmas menjadi BLUD merupakan peluang sekaligus tantangan karena SDM Puskesmas yang berbeda dengan rumah sakit;
- 5) Dengan dilakukannya koordinasi ini diharapkan adanya komitmen untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama terkait dengan pelaksanaan tata kelola BLUD.

**10. WORKSHOP PELAKSANAAN ANGGARAN**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan *workshop* dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB secara daring melalui *Teams Meeting* dan luring yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini Bidang PPA I dan perwakilan Satker Dinas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *workshop* dilakukan dengan pemaparan materi Langkah – Langkah Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilanjutkan dengan pemaparan tentang Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan terkait Indikator dalam IKPA. Materi yang dipaparkan selanjutnya adalah Perubahan – Perubahan terkait Modul Maksimum Pencairan PNBPN dan Kebijakan Anti-Gratifikasi dalam Pelayanan yang dilanjutkan dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *workshop* yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Di awal Juni 2023 ini, nilai IKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebesar 84,41. Nilai ini masih dapat ditingkatkan terutama pada indikator penyerapan anggaran dan capaian output yang memiliki porsi tertinggi. Untuk itu, bagi satker yang belum menyampaikan laporan capaian output, diimbau segera menyampaikan ke KPPN mitra kerjanya sesegera mungkin dan paling lambat 5 hari kerja pertama setelah bulan berakhir.
- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait indikator dalam IKPA adalah Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Penyerapan Anggaran, dan Deviasi Hal III DIPA. Apabila di akhir tahun terdapat keberatan terkait nilai IKPA, satker dapat mengajukan justifikasi nilai IKPA yang diajukan secara berjenjang dari satker, KPPN, Kanwil, kemudian kantor pusat dan harus dilampiri bukti-bukti yang akurat.
- 3) Ketentuan mengenai Juknis Penetapan MP PNBPN diperbarui melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/3023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk

teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara Elektronik.

- 4) Dalam 5 tahun ke belakang tidak terdapat pengaduan terkait gratifikasi yang diterima oleh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

## **11. SINERGI PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN BLU PIP MELALUI KUNJUNGAN/PENDAMPINGAN PADA DTKK KOTA JAMBI DAN KOPERASI AL-ISHLAH**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Kunjungan dan Sosialisasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi dilaksanakan pada Senin, 5 Juni 2023 untuk menyampaikan hasil pemilihan Koperasi dan dilanjutkan kegiatan kunjungan pada koperasi terpilih yaitu KSPPS BMT Al-Ishlah pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 09.00 s.d. 14.30 WIB.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini Bidang PPA II, BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), dan KSPPS BMT Al-Ishlah.

### **c. Rincian Kegiatan**

Pada hari Selasa, 5 Juni 2023 dilakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi dengan melibatkan Sekretaris Dinas dan Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi. Dalam kunjungan tersebut Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Kabid PPA II dan Tim BLU PIP antara lain:

- Kegiatan kunjungan ini diinisiasi karena berdasarkan hasil seleksi akhir pemilihan penyalur UMi, BLU PIP telah memilih KSPPS BMT Al-Ishlah sebagai Koperasi yang memenuhi persyaratan dan paling layak dibandingkan 4 Koperasi yang diusulkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang sebelumnya telah dikoordinasikan juga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Jambi.
- Disampaikan bahwa dengan terpilihnya KSPPS BMT Al-Ishlah menjadikan Kota Jambi sebagai Kota pertama di pulau Sumatera yang memiliki Koperasi penyalur langsung UMi (tidak berafiliasi dengan Bahana Artha Ventura).
- Untuk saat ini yang menjadi penyalur UMi adalah LKBB / Koperasi yang usahanya bergerak pada sektor usaha simpan pinjam, dan direncanakan selanjutnya akan ada penyaluran pembiayaan kepada penyalur sektor produksi
- Diharapkan DTKK sebagai Dinas yang memiliki urusan Pemerintah di bidang Koperasi selanjutnya dapat mengetahui bahwa ada Koperasi di Kota Jambi yang telah terpilih sebagai penyalur pembiayaan UMi dan dapat ikut mengawal

Koperasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyalur langsung pembiayaan UMi.

- Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi menyampaikan bahwa kendala Koperasi di lapangan adalah persaingan dengan PNM, dimana banyaknya anggota Koperasi yang beralih ke PNM karena *rate* yang diberikan sangat kecil. DTKK menyambut baik penunjukan Koperasi sebagai penyalur pembiayaan UMi karena diketahui pembiayaan tersebut benar-benar sangat membantu Koperasi dan anggotanya untuk dapat mengembangkan usaha yang dimiliki anggota.

Pada hari Rabu, 6 Juni 2023 dilakukan kunjungan ke KSPPS BMT Al-Ishlah dan dalam kunjungan tersebut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Tim BLU PIP adalah.

- Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan II membuka acara dengan pengurus KSPPS BMT Al-Ishlah dan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi dan menjelaskan tentang maksud kedatangan kunjungan lapangan yaitu untuk tindak lanjut catatan Rapat Komite Permohonan Menjadi Penyalur yang dilaksanakan 10 April 2023
- Melanjutkan hasil rapat komite pembiayaan yang telah dilaksanakan di PIP, KSPPS BMT Al-Ishlah memiliki tata kelola yang memenuhi syarat sebagai penyalur langsung pembiayaan UMi.
- Selanjutnya secara prinsip KSPPS BMT Al-Ishlah agar dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Telah melakukan RAT Tahun 2022
  - b) Berkomitmen untuk memasang/berlangganan jasa internet
  - c) Menyediakan SDM untuk mengelola aplikasi (operator)
  - d) Memasang dan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat dikoneksikan dengan SIKP UMi, dengan biaya pemasangan yang dapat dibebankan pada PIP
- Telah dilakukan pengecekan atas perangkat yang tersedia, jaringan internet, sistem keuangan yang sudah berjalan di koperasi serta *progress* penggunaan aulia *software*/aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat dikoneksikan dengan SIKP UMi pada KSPPS BMT Al Ishlah oleh pihak BLU PIP.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data lapangan, diketahui beberapa hal yang telah dilakukan KSPPS BMT Al-Ishlah adalah:
  - Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022 pada tanggal 13 Mei 2023.
  - KSPPS BMT AL Ishlah merencanakan untuk memindahkan kantor dari lokasi yang eksisting dikarenakan lokasi yang sekarang sering terkena banjir dari luapan air dekat kantor, sehingga pihak pengurus berencana untuk memindahkan kantor di akhir bulan Juni.
  - Dikarenakan akan dilaksanakan pemindahan kantor maka sementara belum dilakukan pemasangan Wi-Fi. Pemasangan Wi-Fi akan dilakukan setelah kantor baru ditetapkan. Hal ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan efektif dan efisien
  - KSPPS BMT Al-Ishlah sudah menggunakan aplikasi aulia *software* dan migrasi data berjalan dengan lancar. Hal ini memudahkan pihak pengurus koperasi dalam melakukan monitoring dan *upload* data ke SIKP UMi.
  - KSPPS BMT Al-Ishlah sudah menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran baik transaksi cicilan/simpanan anggota. Di samping itu,



proses pencairan pembiayaan kepada debitur sebagian sudah dilakukan melalui metode transfer antar bank.

- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi dapat memahami perannya untuk dapat ikut mengawal Koperasi yang terpilih dalam hal ini KSPPS BMT Al-Ishlah dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyalur langsung pembiayaan UMi.
- 3) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi akan bersinergi dengan PIP dan DTKK Kota Jambi baik dalam pengumpulan data, penilaian dan pembimbingan Koperasi sebagai penyalur pembiayaan UMi nantinya untuk terwujudnya perluasan aksesibilitas pembiayaan UMi bagi UMKM yang berhak.

## **12. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 13.30 s.d.15.30 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPPN Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayanan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Bapak Agung Richardus. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Maret 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 31 Maret 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPP Jambi Telanaipura, pejabat pengawas KPDDP Jambi, perwakilan bidang PPA I, dan pejabat pengawas bidang PPA II.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan pimpinan daerah terkait penyaluran DAU *specific grant* serta akselerasi pelaksanaan DAK Fisik seiring telah diterapkannya Juknis DAK Fisik dengan Perpres 15/2023..
- 2) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 31 Maret 2023.

**13. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi Pejabat Administrator pada Unit Kemenkeu yang berlokasi di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID*: 449 691 855 682; *Passcode*: J8ERXN).

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan perwakilan pejabat fungsional dan pegawai lingkup Provinsi Jambi.

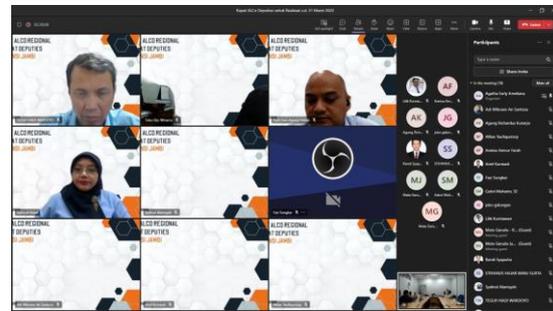
**c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPP, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Maret 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Muara Bungo)

- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (KPPBC TMP B Jambi).
- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I dan KPPN Bangko)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional dan Realisasi TKD (PPA II)
- 6) Kajian terkait Sanitasi, Air Bersih, dan Stunting yaitu Konsep Percepatan Open *Defecation Free* (2022) dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi (2023) oleh Staf Balitbangda Provinsi Jambi

Pemaparan dilakukan oleh Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA II, Kepala KPPN Bangko, Kepala KPP Pratama Muara Bungo, Kepala KPP Pratama Jambi Kuala Tungkal, dan Perwakilan Mata Garuda.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perlu memperkuat koordinasi Kemenkeu Regional Jambi pada sisi analisis ekonomi dan fiskal melalui penyajian data yang lebih detail.
- 2) Perlu terus meningkatkan koordinasi dengan pihak lain seperti halnya Mata Garuda, *local expert*, dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kualitas analisis ALCo Regional Jambi.

### 14. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 pukul 10.00 s.d. 11.40 WIB secara *hybrid* bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan melalui media virtual Teams (*Meeting* ID: 489 737 974 16; Passcode: PustTD)

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi,

Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Maret 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNPB dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 31 Maret 2023 serta *issue* strategis lainnya.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 31 Maret 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

1. Kinerja penerimaan pajak luar biasa tumbuh di atas 100% dan secara realisasi sudah sampai angka 22,09%. Hal ini tentunya menjadi suatu pertanda positif yang menunjukkan geliat sektor riil yang sudah mulai pulih dan semoga kinerja penerimaan dapat terus meningkat melampaui dari target yang sudah dicanangkan.
2. Apresiasi untuk restitusi yang masih tumbuh negatif karena biasanya pada awal tahun restitusi meningkat.
3. Sektor terbesar yang tumbuh positif (secara presentase) adalah sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin. Sektor ini patut didukung meskipun dari sisi jumlah/nominal masih kecil.

4. Dari sisi kontribusi per WP, WP Badan dengan komposisi terbesar. Hal ini juga tidak mengesampingkan pajak perorangan. Apresiasi untuk SPT Tahun 2022 yang sudah tuntas dengan menunjukkan peningkatan.
5. Apresiasi untuk neraca perdagangan yang surplus, namun dari sisi pendapatan bea keluar turun yang mana perlu dicari berbagai sumber yang dapat meningkatkan BK.
6. Kinerja PNBP DJKN sangat luar biasa terutama lelang meskipun presentase hanya 22% namun dari sisi nominal sudah besar. Dari tiga jenis PNBP tersebut, mari terus bersama dimaksimalkan.
7. Dari sisi belanja *I-Account* sudah sekitar 20% yang mana belanja pemerintah pusat sudah tercapai 17% (standar 15-20%). Meskipun jika dilihat per provinsi, sudah ada provinsi yang di atas 20%. Transfer ke daerah hampir 21% dan hal ini merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi karena realisasi ini tergantung kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan. DAK Fisik masih minim realisasinya dan baru 1 pemda yaitu Tanjabbar, hal ini dapat menjadi contoh bagi pemda lain.
8. Kontribusi TKD bagi APBD masih cukup tinggi, diharapkan PAD dapat meningkat.
9. Pola penanganan sampah pemda Kota Jambi dapat menjadi benchmark bagi kota/kabupaten lain dan perlu diperhatikan oleh pemda sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit untuk masyarakat.
10. Dukungan pemerintah melalui APBN yaitu melalui belanja K/L teknis yang ada di lingkup Provinsi Jambi.
11. Catatan khusus *local expert* pada Kanwil DJPb harus diperhatikan. Kanwil DJPb harus terus meningkatkan perannya, tidak hanya menyalurkan dana desa tetapi juga mengawasi penggunaannya sehingga tepat sasaran. Catatan lain yaitu koordinasi dengan berbagai instansi juga perlu diperhatikan.
12. Pada rapat ALCo Regional selanjutnya akan dikoordinasikan lebih lanjut terkait waktu pelaksanaan dan kemungkinan tidak hari Jumat sehingga waktu dapat lebih panjang dan diharapkan seluruh pejabat terkait dapat hadir.
13. Perlu dipertimbangkan usulan untuk mengadakan press release di kampus sehingga diharapkan akan mendapatkan pandangan-pandangan dari sisi yang berbeda dan lebih luas.

## **15. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2022**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 14.00 s.d.15.30 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

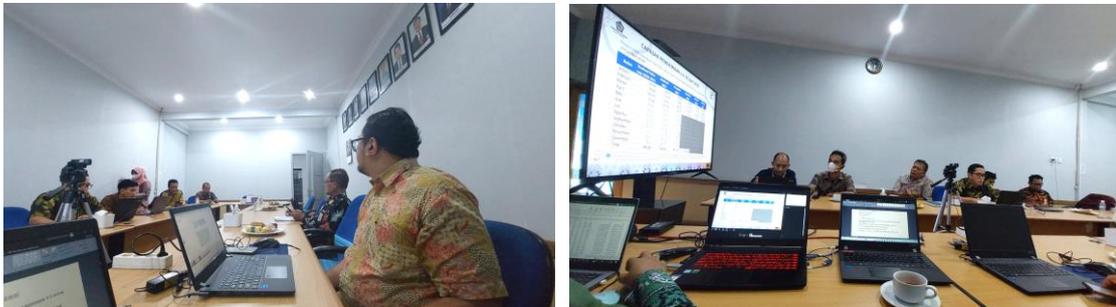
**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPPN Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayanan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

**c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Bapak Agung Richardus. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 April 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 30 April 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, perwakilan KPP Pratama Jambi Pelayanan, perwakilan bidang PPA I, perwakilan KPPN Jambi, dan pejabat pengawas bidang PPA II.



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan pimpinan daerah terkait penyaluran DAU *specific grant* serta akselerasi pelaksanaan DAK Fisik seiring telah diterapkannya Juknis DAK Fisik dengan Perpres 15/2023.
- 2) Perlu memperkuat koordinasi Kemenkeu Regional Jambi pada sisi analisis ekonomi dan fiscal melalui penyajian data yang lebih detail.

- 3) Perlu terus ditingkatkan koordinasi dengan pihak lain seperti halnya *local expert* dan pihak-pihak lain agar semakin meningkat kualitas analisis ALCo Regional Jambi.
- 4) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 30 April 2023.

## **16. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2023**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2023 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi peserta di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID*: 449 691 855 682; *Passcode*: J8ERXN) bagi peserta dari luar Kota Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Pegawai Administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPK, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 April 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan *local issue* (KPP Jambi Telanaipura, KPP Muara Bungo)
- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, isu strategis dan *local issue* (KPPBC TMP B Jambi).
- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan isu strategis (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I dan KPPN Muara Bungo)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD, dan issue strategis (PPA II)



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Isu jalan lintas batu bara

- Mempercepat pembangunan jalan khusus untuk angkutan Batu Bara.
- Meningkatkan intensitas perawatan dan perbaikan jalan ruas yang dilalui angkutan batubara eksisting.

2) Isu meningkatnya peredaran rokok ilegal

- Pengawasan yang efektif dari hulu ke hilir dimana melibatkan beberapa instansi vertikal BC.
- Melakukan pengumpulan data dan kajian terkait pendirian KIHT di Kabupaten Kerinci.

3) Isu tidak tercatatnya banyak komoditi ekspor

- Melakukan komunikasi yang intens dengan Pemerintah daerah setempat, utamanya daerah penghasil komoditas unggulan.
- Melakukan pengumpulan data dan kajian pendirian PLB Ekspor.

4) Isu Proyek Strategis Nasional

Bagi Satker terkait perlu menindaklanjuti dalam:

- Menetapkan pengelola keuangan Satker PJBH
- Menyusun Kontrak PBJ sesuai target penyerapan anggaran sesuai ketentuan
- Menyusun RPD sesuai kontrak
- Merevisi anggaran dari PJN I ke Satker Baru
- Menyusun timeline pelaksanaan kegiatan
- Menyusun manajemen risiko atas pelaksanaan kegiatan

5) Isu Tematik ALCo: Reviu Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai Implementasi UU No. 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kemenkeu Satu di daerah bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi berkolaborasi dalam:

- Mendorong KPP dan Pemda bersinergi untuk melakukan penguatan basis data dengan melakukan penilaian kembali atas objek pajak bumi dan bangunan.
- Mendorong Pemda untuk dapat bersinergi dengan instansi terkait (termasuk KPKNL) dalam upaya penagihan utang pajak/retribusi.
- Mendorong penguatan SDM Pemda terkait pengelolaan PAD melalui serangkaian pelatihan yang dapat didukung oleh BDK Pekanbaru.
- Mendorong Pemda untuk melakukan otomatisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

## **17. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2023**

### **e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB melalui media virtual Teams (*Meeting ID: 487 523 114 813; Passcode: q5t3Po*)

### **f. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

### **g. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 April 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNPB dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 30 April 2023 serta *issue* strategis lainnya.



## h. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 30 April 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

14. Keterlibatan para *local expert* memberikan pandangan akademik terkait penguatan pajak daerah perlu diapresiasi. Di sisi lain, KPP juga perlu memberikan pencerahan terkait pajak pusat dan pajak daerah, sehingga dapat mendapatkan gambaran bagaimana aliran pendapatan pada level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. Dari sisi pendapatan, perkembangan positif dilihat dari penerimaan pajak, bea cukai, termasuk juga PNBPKPKNL. Dari sisi belanja, realisasi sudah di angka 28% per 30 April, yang pada posisi 22 Mei sudah mencapai 38%; meskipun ada catatan SILPA pemerintah daerah yang masih cukup besar. SILPA diharapkan dapat digunakan tahun ini sehingga *multiplier effectnya* dapat dirasakan oleh masyarakat.
16. Perlu untuk terus menyediakan berbagai saluran dan media yang mempertemukan antara *Local Expert* dari kalangan akademisi dengan Kementerian Keuangan, untuk bersama-sama berkontribusi dan memberikan nilai tambah bagi kajian dan pelaksanaan tugas di daerah.



FKPKN 🌟 TRIWULAN II 2023 🌟 KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS/ TEMATIK

## PELAKSANAAN KEGIATAN TEMATIK

### 1. SOSIALISASI *BIOCARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE*

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 pukul 10.30 s.d. 12.30 WIB secara daring melalui *Ms. Teams* dan secara luring bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan pejabat/pegawai peserta rapat FGD *Troubleshoot TIK* tanggal 30 Mei 2023 serta seluruh kepala kantor vertikal Kemenkeu Provinsi Jambi.

#### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Burhani AS selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Acara inti yaitu pemaparan materi sosialisasi dengan tema “Mengenal BLU BPD LH serta Program *BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes*” oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Bapak Joko Tri Haryanto yang dimoderatori langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, didapatkan poin-poin sebagai berikut:

- 1) BLU BPD LH, melalui salah satu direktoratnya yaitu Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana, mengelola beberapa dana amanah yang bersumber dari negaranegara donor. Dana terbesar adalah dana pembayaran berbasis kinerja dari lembaga internasional perubahan iklim.

- 2) BPD LH mengelola dana dengan berbagai skema, di antaranya GCF/*Green Climate Fund* (pembayaran berbasis kinerja sebagai imbal balik atas dari penurunan emisi karena telah menurunkan deforestasi dan degradasi), FCPF/*Forest Carbon Partnership Facility*, dan BioCF/*BioCarbon Fund*.
- 3) Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Timur adalah dua Provinsi yang mendapatkan dukungan dana untuk penurunan emisi dari Bank Dunia melalui BLU BPD LH. Dukungan ini disalurkan melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja. Kalimantan Timur pembayaran berbasis kinerja sebesar US\$ 110 dengan target penurunan emisi sebesar 20 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen. Provinsi Jambi awalnya mendapatkan sebesar US\$70, namun salah satu konsorsium bank dunianya mundur sehingga menjadi US\$50 dengan target penurunan emisi sebesar 10-14 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen.
- 4) SRN (Sistem Registri Nasional) merupakan dokumentasi dan menjadi *centre based* seluruh perhitungan emisi. SRN menjadikan emisi sebagai stock. Karbon bisa menjadi *flow* maupun *stock*. SRN inilah yang dievaluasi secara rutin dan pemerintah melaporkan pada konferensi internasional.
- 5) BPD LH akan berkoordinasi dengan Kanwil Kaltim dan Jambi, sehingga penerapan praktek terbaik (*best practice*) keduanya dapat menjadi *lesson learned* untuk daerah-daerah lain, untuk kemudian disosialisasikan ke daerah lain.
- 6) Kanwil DJPb serta seluruh kantor Kemenkeu di Provinsi Jambi berkomitmen mendukung tugas-tugas BPD LH, dan siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam setiap program/kegiatan BPD LH di Provinsi Jambi.

## **2. RAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB yang dilakukan secara daring melalui *Teams Meeting* dan secara luring yang bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam hal ini adalah Bidang PPA II, KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP Pratama Jambi Pelayangan, dan BPPK Pekanbaru.

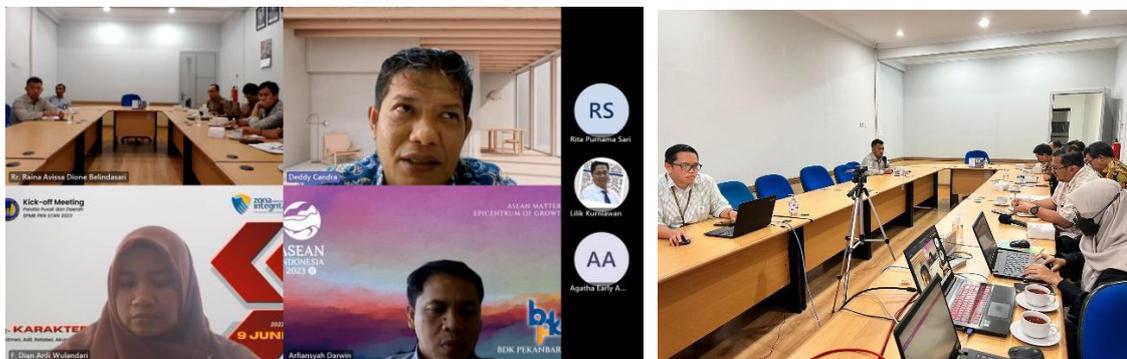
### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan rapat dilaksanakan dalam rangka untuk untuk mengetahui strategi peningkatan kapasitas pajak daerah di Provinsi Jambi, memperkuat sinergi serta kerja sama antara Kemenkeu Satu dengan Pemda dan Satker dalam pengelolaan keuangan negara sehingga mampu meningkatkan perekonomian, serta dalam rangka meningkatkan potensi kapasitas pajak daerah Provinsi Jambi melalui penguatan SDM bagi pengelola pajak daerah termasuk peningkatan kompetensi serta pengelolaan data dan digitalisasi pajak daerah

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PPA II selaku Ketua Pokja RCE dengan menyampaikan pengantar dilaksanakannya kegiatan rapat yaitu berdasarkan hasil kajian Pokja RCE terkait dengan *Local Taxing Power* sehubungan dengan implementasi UU HKPD terdapat beberapa identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penguatan pajak daerah diantaranya:

- a) Dari struktur organisasi, pengelola pajak daerah ada yang terbagi menjadi dua yaitu pengelola pengeluaran daerah dan pengelola pendapatan daerah
- b) Dari sisi kualitas SDM, pengelola penerimaan pendapatan daerah membutuhkan peningkatan kompetensi
- c) Terkait dengan data, penyetoran dan pembukuan sudah dilakukan secara digital, namun dasar perhitungan masih dilakukan secara manual

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP Pratama Jambi Pelayangan, dan BPPK Pekanbaru.



#### d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat peningkatan kapasitas pajak daerah, didapatkan hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai identifikasi awal, Pemda memang memerlukan pengembangan kapasitas SDM. Hal ini akan digali lebih mendalam saat FGD dengan Pemda, sehingga bisa diperoleh urgensi kebutuhan pelatihan kepada BDK terkait pengembangan kapasitas kompetensi SDM di Pemda.

- 2) Terkait dengan data, dari pihak Kementerian Keuangan akan menawarkan tiga sudut pandang data, diantaranya data terkait Pajak Konsumsi dan Pajak Akomodasi, PBB-P2, dan Pajak Hiburan.
- 3) SDM Pemda dalam bidang Penilaian perlu diperkuat dan diperbaiki, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, terhadap Fungsional Penilai di Pemda dapat dilakukan diklat atau bimbingan teknis, mulai dari tahap awal berupa tata cara penghitungan bangunan, pengumpulan data transaksi jual-beli, dan sebagainya yang kemudian dapat dilanjutkan pelatihannya secara berkelanjutan.
- 4) Sinergi senantiasa dibangun sebagai wujud Kemenkeu Satu.

### **3. MONEV DAN PEMBINAAN BLU PROVINSI JAMBI**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jambi Kampus Mendalo Barat.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku Tim monev yang merupakan pejabat dan pelaksana pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I yang diketuai oleh Bapak Tulus Eko Winarso selaku kepala bidang, sedangkan dari pihak Universitas Jambi yang hadir dipimpin oleh Ibu Retno selaku Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan beserta jajaran pengelola keuangan Universitas Jambi.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Agenda kegiatan monev dan pembinaan BLU meliputi konfirmasi atas tindak lanjut temuan permasalahan periode sebelumnya serta pemantauan terhadap pada 7 (tujuh) aspek monev sesuai kertas kerja pembinaan satker BLU. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji mekanisme pelaksanaan anggaran PNBK pada BLU, memperoleh informasi terkait kinerja keuangan dan kinerja layanan pada BLU, mengetahui implementasi Tingkat Maturitas BLU, dan memperoleh informasi tindak lanjut atas pelaksanaan monev BLU periode sebelumnya.

Ruang lingkup objek pembinaan berpedoman pada Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU nomor KEP-12/PB.5/2023 antara lain meliputi:

- 1) Aspek Pengelolaan Keuangan; Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran;

- 2) Aspek Pengelolaan Pendapatan dan Belanja; Pengelolaan Kas dan Rekening; Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- 3) Aspek Tata Kelola; Penerapan Tata Kelola yang baik;
- 4) Aspek Standard dan Tarif Layanan; dan
- 5) Aspek Tingkat Maturitas BLU.



#### d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil monev dan pembinaan yang telah dilakukan Secara umum Universitas Jambi sebagai satker yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU telah menyelenggarakan layanan dengan proses bisnis yang baik dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan, namun dalam upaya perbaikan tata kelola dan optimalisasi keuangan BLU terdapat beberapa hal yang menjadi fokus antara lain:

- 1) Universitas Jambi telah menjalankan kegiatan pengelolaan kas BLU dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan, namun terdapat beberapa kegiatan yang secara rutin telah dilakukan yang belum memiliki ketentuan dan SOP, misalnya dalam penatausahaan saldo BLU sebagai Uang Persediaan (UP) yang dikelola BPP dan pemberian Uang Muka kegiatan.
- 2) Rata-rata tingkat deviasi kumulatif pada halaman III DIPA sampai dengan Mei 2023 cukup tinggi rata-rata sebesar 43,57%. Hal ini mencerminkan belum efektifnya kesesuaian perencanaan keuangan dan realisasi kegiatan yang dilakukan.

- 3) Optimalisasi kas BLU berupa pemanfaatan idle cash BLU dalam bentuk investasi jangka pendek belum dilakukan dan belum terdapat SOP serta aturan yang mengatur terkait pengelolaan kas BLU dalam bentuk investasi.
- 4) Universitas Jambi telah menyelenggarakan tata kelola dengan baik, keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan telah disediakan dengan mengoptimalkan *website* yang mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan pendidikan. Pengelolaan penerimaan BLU juga telah diselenggarakan secara *cashless* dan berbasis elektronik.
- 5) Nilai tingkat maturitas Universitas Jambi untuk tahun anggaran 2021 adalah 2,79 (skala 5) atau masih berada pada level 2 (managed), artinya BLU dinilai mampu menyelenggarakan aktivitas bisnis nya secara berulang, namun aktivitas tersebut belum didokumentasikan secara standar melalui SOP dan surat keputusan dari pimpinan BLU.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, Kanwil DJPb Jambi memberikan saran dan rekomendasi diantaranya:

- 1) Universitas Jambi perlu melengkapi dokumentasi kegiatan pengelolaan keuangan yang selama ini telah dilakukan kedalam aturan dan SOP kegiatan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU seperti pengelolaan UP dan UM pada BPP. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan memiliki dasar aturan tertulis yang menjadi *guidance* para pihak/unit yang terlibat pada siklus kegiatan tersebut.
- 2) Universitas Jambi telah menyusun perencanaan kas berdasarkan usulan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana dari tiap unit kerja, namun koordinasi bagian perencanaan dengan unit teknis dalam penyesuaian rencana kegiatan apabila terjadi perubahan perlu ditingkatkan, hal ini bertujuan agar perhitungan kebutuhan dana secara efisien dapat dilakukan sehingga besaran *idle cash* yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi jangka pendek dapat ditentukan.
- 3) Dalam pengisian kertas kerja *Maturity Rating* BLU operator maupun *approver* aplikasi BIOS Universitas Jambi agar memperhatikan kesesuaian dokumen dengan kriteria/topik yang diminta. Kegiatan/aturan yang telah didokumentasikan dapat disertakan apabila berkaitan dengan topik/kriteria pertanyaan, misalnya dalam pengelolaan risiko dapat disertakan dokumentasi kegiatan notula rapat, undangan, materi maupun dokumen profil risiko itu sendiri.

## PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

### 1. MUSRENBANG RKPD PROVINSI JAMBI

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 bertempat di *Ballroom* Swiss-Belhotel Jambi.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Gubernur Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Jambi, Kepala BULOG Jambi, dan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.

#### c. Rincian Kegiatan

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Provinsi, dengan maksud untuk menyepakati permasalahan, prioritas, arah kebijakan daerah, dan program kegiatan, serta menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa rata-rata realisasi sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 sudah *on the track* sesuai target yang sudah kita tetapkan untuk tahun 2022, bahkan ada sasaran pembangunan yang sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Terdapat empat isu strategis yang diangkat untuk pembangunan Tahun 2024, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, kualitas hidup sumber daya manusia, *bottleneck* jalur logistik, serta pemilu dan pilkada serentak. Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2024 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah “Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.



#### d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil paparan dan diskusi pada acara tersebut, prioritas pembangunan dalam RKPd Provinsi Jambi 2024 adalah:

- 1) Peningkatan produktivitas
- 2) Pembangunan SDM
- 3) Pembangunan infrastruktur daerah
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 5) Ketenteraman dan ketertiban umum

## 2. KUNJUNGAN KE BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 2 April 2023 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA II dan Kepala KPPN Kuala Tungkal dengan Bupati Tanjung Jabung Barat didampingi Plt. Kepala BPKD dan Kepala Dinas PUPR.

### c. Rincian Kegiatan

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat (melalui Dinas PU) yang menjadi penda pertama yang menyalurkan DAK Fisik pada triwulan I Tahun 2023 lingkup Provinsi Jambi.

Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga menyoroti keberhasilan Pemkab Tanjung Jabung Barat yang meraih prestasi pemda dengan penurunan prevalensi stunting terbaik di Provinsi Jambi. Harmonisasi APBN-APBD serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melawan stunting menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemkab Tanjung Jabung Barat, ujar Bapak Anwar Sadat.

Di akhir diskusi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan potensi dukungan investasi dan dukungan UMKM (Pembiayaan KUR dan UMi) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan harapan agar hubungan yang baik antara Kementerian Keuangan dhi. DJPb melalui Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta KPPN Kuala Tungkal dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat dapat terus dijaga.



#### **d. Hasil yang Dicapai**

Dari kegiatan kunjungan yang telah dilakukan, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Kuala Tungkal berkomitmen memberikan dukungan kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui *Financial Advise* dan pelayanan perbendaharaan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **3. KUNJUNGAN KE KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 April 2023 bertempat di Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA I dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Dalam diskusi tersebut, kedua pimpinan instansi di Provinsi Jambi sepakat bahwa komunikasi yang baik merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan kinerja dan keuangan satuan kerja yang saling berkaitan.

Selain itu, Kepala Kanwil DJPb Jambi juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran dari satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Jambi serta memberikan penghargaan atas capaian Bagian Anggaran Kemenkumham Jambi memperoleh peringkat terbaik ke-6 IKPA se-Provinsi Jambi.



#### **d. Hasil yang Dicapai**

Komitmen Kanwil DJPb dalam menjalankan peran FA tersebut diimplementasikan dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Satker Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi serta akan melibatkan KPPN untuk mendukung peran FA.

### **4. MENERIMA KUNJUNGAN DIREKTUR PEMASARAN BANK 9 JAMBI**

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 April 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA II dan Kepala Seksi PPA II A dengan Direktur Pemasaran Bank 9 Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan evaluasi atas implementasi Kanal 7020. Di Provinsi Jambi, belum terdapat pemerintah daerah yang menerapkan SP2D online, sehingga memerlukan perhatian lebih dari para pemangku kepentingan.

**d. Hasil yang Dicapai**

Diharapkan terdapat pemerintah daerah yang menerapkan SP2D online di tahun 2023. Piloting akan dimulai pada pemprov Jambi yang dinilai memiliki pengelolaan Keuangan paling matang.

**5. KUNJUNGAN KE GUBERNUR JAMBI****a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 April 2023 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi para kepala bidang dan Kepala KPP Pratama Jambi Pelayanan.

**c. Rincian Kegiatan**

Dalam diskusi tersebut, disampaikan upaya peningkatan keselarasan APBN dan APBD. Selain itu, prospek perekonomian regional Jambi juga didiskusikan pada kegiatan tersebut. Kegiatan perekonomian Jambi yang ditopang oleh sektor pertambangan dan perkebunan menjadi potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan (perpajakan). Beberapa komoditas ekspor dari Jambi pun merupakan produk dari sektor pertambangan dan perkebunan.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dalam upaya mengoptimalkan potensi tersebut diwujudkan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi, yaitu Pembangunan Pelabuhan Terminal Petikemas di Muaro Jambi. Proyek tersebut ditetapkan oleh Kemenko Perekonomian.



**d. Hasil yang Dicapai**

Dari kegiatan kunjungan yang telah dilakukan, diharapkan semakin terjalin hubungan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam keselarasan APBN dan APBD. Sinergi tersebut akan memberi dampak yang lebih masif terhadap perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jambi

**6. KUNJUNGAN KE KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 April 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi para kepala bidang.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Financial Advisor* (FA). Dalam diskusi tersebut, disampaikan evaluasi atas pelaksanaan APBN satker lingkup Kejaksaan Tinggi

Jambi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi PNPB untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Selain itu, didiskusikan juga strategis Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, utamanya pada penggunaan APBN sebagai instrumen pendukung.



#### d. Hasil yang Dicapai

Pengelolaan APBN yang optimal dapat mendukung peran strategis dari satuan kerja. Sebagai salah satu satker yang menjadi stakeholder dalam Pemilu 2024, pengelolaan APBN diharapkan dapat mendukung kondusifitas Pemilu 2024.

### 7. KUNJUNGAN KE KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAMBI

#### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Mei 2023 bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

#### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA I dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

#### c. Rincian Kegiatan

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang menjadi *concern* kedua pimpinan adalah menggunakan APBN sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian agama untuk mencapai cita-cita bangsa, di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan pada Madrasah di Provinsi Jambi.

Kemudian, di akhir diskusi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan beberapa indikator dalam IKPA yang masih bisa ditingkatkan oleh satker-satker Kemenag di Provinsi Jambi, yaitu penyerapan, deviasi halaman III DIPA, dan capaian output. Kepala Bidang PPA I menambahkan strategi dalam mengoptimalkan nilai pada indikator-indikator tersebut.



**d. Hasil yang Dicapai**

Terjalin kerja sama dan komunikasi yang semakin baik, sehingga pelaksanaan APBN oleh satker BA 025 di Provinsi Jambi semakin baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama.

**8. RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Ratu *Convention Center*, Hotel Shang Ratu, Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Gubernur Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Jambi, Forkompimda, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber dan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah bahkan diberikan anggaran dan instrumen hukum, instrumen kewenangan yang lainnya, ada dana dekonsentrasi, kemudian ada instrumen kewenangan. Para gubernur bisa melakukan reviu APBD pada pemerintah Kabupaten/Kota.

GWPP memastikan efektifitas pemanfaatan APBN di daerah (Binwas TP), serta Alokasi DAK sesuai dengan Prioritas nasional melalui Rekomendasi usulan DAK. GWPP BINWAS penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab/Kota,

memastikan regulasi daerah yang efektif dan evaluasi Ranperda APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota. GWPP memastikan optimalisasi *Public Service* Kab/Kota, melalui Pengawasan Capaian SPM Kabupaten/Kota dan pelayanan publik (perizinan dan non perizinan) Kabupaten/Kota. GWPP mendukung PEN melalui pemetaan potensi kerjasama daerah dan pengembangan peningkatan daya saing berbasis KSN. GWPP mendorong “Pembangunan Indonesia dari Pinggiran” melalui pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman pemerintah.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menambahkan informasi pagu, realisasi, serta isu strategis anggaran Dekonsentrasi, Desentralisasi, serta Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Jambi. Beliau menyampaikan beberapa hal, di antaranya Realisasi Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sampai dengan triwulan I tahun 2023 masih belum mencapai target penyerapan sekitar 16-20%, Realisasi Satker Dekonsentrasi sebesar 5,69% dan satker Tugas Pembantuan.

Adanya Blokir Pagu Anggaran pada beberapa satker sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan, khususnya satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang masih di blokir seluruhnya, informasi yang diterima saat ini masih dilakukannya sinkronisasi aturan teknis di level pusat. Belum adanya persetujuan Eselon I untuk pembukaan rekening Virtual Account Bendahara Pengeluaran pada satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Nilai IKPA terutama indikator Hal III DIPA masih rendah disebabkan satker belum mengajukan revisi halaman III DIPA sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Masih kurangnya informasi dan pemahaman satker terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan.



#### d. Hasil yang Dicapai

Membangun sinergi pusat dan daerah melalui kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan *partnership* dalam bingkai sinergi untuk negeri di antaranya

dengan penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah.

## **9. FORUM SILATURAHMI INSTANSI VERTIKAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN SEKRETARIAT STUNTING PROVINSI JAMBI**

### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB bertempat di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Kepala Kantor Instansi Vertikal yang ada di Kota Jambi termasuk BUMN, Media, Perguruan Tinggi, serta sekretariat stunting lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

### **c. Rincian Kegiatan**

Pertemuan ini didasari oleh tugas kita bersama bahwa kita sebagai abdi negara pelayan masyarakat untuk dapat memusatkan perhatian kita pada isu-isu nasional termasuk masalah stunting sesuai dengan amanat Perpres 72 Tahun 2021. Kemudian harapan dari Menko PMK terkait dengan target penurunan stunting Provinsi Jambi di angka satu digit, dimana pada Tahun 2021 Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan angka stunting sampai pada 18%. Pertemuan ini harapannya dapat berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Mengajak seluruh instansi untuk mempererat hubungan dengan tujuan mulia bersama. Jika ada instansi vertikal yang belum masuk kedalam *whatsapp group*, mungkin dapat bisa bergabung untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi.

Kakanwil DJPb menyampaikan, “Dalam wilayah dinas kita, Ada FKPKN Forum koordinasi pengelolaan keuangan negara, operasionalnya Dana konsentrasi dan sumber bantuan, dana yang bersumber transfer ke daerah yaitu Dana Alokais Umum. Dalam dana ini sudah ada dana untuk porsi kesehatan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pimpinan daerah mengelola untuk mendukung penurunan stunting., termasuk fasilitasi sarana air bersih. Maka sebenarnya banyak sumber dana yang dapat dikelola, tergantung dengan *good will* (pimpinan yang baik) dalam pengelolaannya. Kami sangat mendukung untuk penurunan stunting.”



**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan diskusi dalam forum, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Tujuan dari forum silaturahmi ini adalah meningkatkan hubungan yang erat antar intervensi vertikal serta membangun kerjasama secara berkelanjutan dalam membangun dan memajukan Provinsi Jambi termasuk mengatasi masalah stunting bersama-sama.
2. Instansi vertikal pada dasarnya mendukung percepatan penurunan stunting.
3. Program BAAS dapat menjadi sarana bagi instansi vertikal untuk terlibat dan berkontribusi langsung mengenai sasaran intervensi stunting.
4. BKKBN terbuka dengan pertanyaan mengenai mekanisme Program BAAS.
5. Pertemuan-pertemuan serupa seperti ini mungkin dapat dilakukan di lain tempat secara berkelanjutan dengan bahasan yang lebih dalam lagi.

**10. IMPLEMENTASI SIMGAJI WEB DAN REKONSILIASI DATA SERTA IURAN IWP 8% JKK DAN JKM PNS, PPPK, DAN PEJABAT NEGARA CATURWULAN I TAHUN 2023**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juni 2023, bertempat di ruang aula PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Drs. Burhani AS,M.M., didampingi *Branch Manager* PT Taspen (Persero) Jambi, Nugroho Agus Wibowo, acara tersebut dihadiri Kepala KPPN seWilayah Provinsi Jambi, dan dihadiri Kepala Badan Keuangan, Pejabat Keuangan dan Jajaran Operator Simgaji dari 12 Pemerintah Daerah se-Wilayah Provinsi Jambi yang hadir secara langsung maupun virtual melalui *zoom meeting*.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan Implementasi SIMGAJI Web dan Rekonsiliasi Data serta Iuran IWP 8% JKK dan JKM PNS, PPPK, dan Pejabat Negara Caturwulan I Tahun 2023, akan berlangsung selama dua hari. Dalam Kegiatan tersebut, Branch Manager TASPEN Jambi mengucapkan banyak terima kasih Kepada Kepala DJPb, Kepala KPPN, dan Pejabat PEMDA beserta jajaran seWilayah Provinsi Jambi atas support dan kerjasamanya.

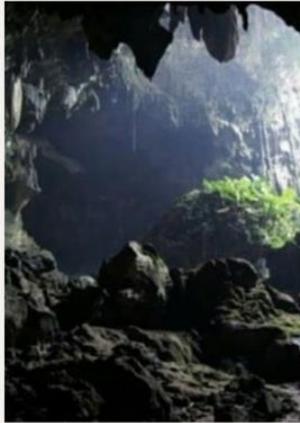
Acara rekonsiliasi ini untuk mencocokkan dan mendapatkan data yang benar terkait realisasi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) bulan Januari sampai April 2023 yang akurat yaitu penerimaan PFK gaji PNS Pusat dan PNS Daerah. Dan dilanjutkan, dengan kegiatan Migrasi dan Implementasi SIMGAJI berbasis desktop menjadi New SIMGAJI Berbasis Web untuk seluruh 12 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi.

Salah satu keunggulan *New SIMGAJI* berbasis Web, anak yang berusia 21 tahun secara otomatis sudah terkunci tidak akan lagi mendapatkan tunjangan. Namun, apabila melampirkan surat keterangan kuliah nantinya bisa terbuka lagi sampai usia maksimal 25 tahun.



**d. Hasil yang Dicapai**

Hasil yang dicapai dari kegiatan implementasi antara lain meningkatkan layanan TASPEN Kepada Stakeholder dan ASN serta pengelolaan Keuangan Pemda lebih optimal, akurat, dan akuntabel dengan potongan otomatis.



FKPKN 🌟 TRIWULAN II 2023 🌟 KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# PELAKSANAAN KEGIATAN LOCAL EXPERT

## **PELAKSANAAN KEGIATAN *LOCAL EXPERT***

### ***FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DISEMINASI FISKAL REGIONAL DENGAN TEMA PENGUATAN LOCAL TAXING POWER SESUAI IMPLEMENTASI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH***

#### **a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB yang dilaksanakan secara daring melalui *Teams Meeting* dan secara luring yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

#### **b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP Pratama Jambi Pelayanan, BPKPD Provinsi Jambi, BPPRD Kota Jambi, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, BPPRD Kabupaten Batanghari, *Local Expert* dari UNJA, dan BDK Pekanbaru.

#### **c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka untuk menyebarkan informasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusunan kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat, serta investor. Selain itu untuk mengetahui strategi penguatan *Local Taxing Power* di Provinsi Jambi, memperkuat sinergi serta kerja sama antara Kanwil DJPb dengan Pemda dan Satker dalam pengelolaan keuangan negara sehingga mampu meningkatkan perekonomian, dan dalam rangka untuk meningkatkan potensi kapasitas pajak daerah di Provinsi Jambi.

Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bapak Irwan Wahyu Basuki yang menyampaikan bahwa kesempatan kali ini dapat dilakukan diskusi bersama dengan RaperdaPDRD, skenario Opsen Pajak Daerah dan dampaknya terhadap PAD APBD, skenario atau startegi daerah untuk perluasan basis pajak daerah, serta penyederhaan retribusi daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Bidang PPA I, BPKPD Provinsi Jambi, BPPRD Kota Jambi, BPPRFD Kabupaten Muaro Jambi, dan BKD Kabupaten Batanghari, dan *Local Expert*.



**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil FGD yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melakukan identifikasi beberapa issue terkait penguatan *Local Taxing Power* di Provinsi Jambi, antara lain belum optimalnya pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, keterbatasan kompetensi dan kualitas SDM, belum optimalnya penerapan teknologi informasi, serta basis data perpajakan yang perlu dimutakhirkan;
- 2) Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemda Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari menyampaikan strategi dan tantangan penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3) BDK Pekanbaru memiliki beberapa jenis pelatihan untuk *meningkatkan SDM pengelola pajak dan retribusi Pemda, baik yang tersedia melalui Kemenkeu Learning Center (open access), pelatihan jarak jauh, maupun pelatihan klasikal (tatap muka);*
- 4) KPP Pratama Jambi Telanaipura dan Pelayanan bersedia untuk melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Pemda untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah;



- 5) UNJA pada tahun ini akan berkomitmen untuk melaksanakan penelitian terkait perekonomian hijau yang inklusif dan untuk lokusnya berada di Merangin, Muaro Jambi, dan Tanjabtim;
- 6) Terkait dengan *green economy*, Bappeda sedang melakukan proses penetapan nilai konservasi tinggi dan *high carbon value* sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan bagi Provinsi Jambi karena Jambi menjadi salah satu dari dua daerah yang ditetapkan untuk penerimaan BioCF;
- 7) Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, Provinsi Jambi secara konsolidasian diharapkan mampu meningkatkan nilai PAD.



FKPKN ✨ TRIWULAN II 2023 ✨ KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **KESIMPULAN**

1. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD, dan TKD, telah dilaksanakan edukasi terhadap Satuan Kerja maupun OPD terkait secara berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, dan rapat koordinasi baik dari sisi perencanaan hingga pelaporan keuangan negara mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis terutama pada awal tahun anggaran
2. Guna meningkatkan sinergi antara pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan para pimpinan daerah dalam rangka menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, Kanwil DJPb Jambi melaksanakan kegiatan audiensi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah
3. Untuk mengenal lebih dalam terkait BLU BPD LH serta Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan langsung Direktur Utama BLU BPD LH ke Kanwil DJPb Provinsi Jambi
4. Dalam rangka memperkuat sinergi serta kerja sama antara Kemenkeu Satu dengan Pemda dan Satker dalam pengelolaan keuangan negara sehingga mampu dalam meningkatkan perekonomian, Kanwil DJPb Provinsi Jambi secara aktif melibatkan KPP dan BPPK melaksanakan rapat untuk meningkatkan potensi kapasitas pajak daerah Provinsi Jambi melalui penguatan SDM bagi pengelola pajak daerah termasuk peningkatan kompetensi serta pengelolaan data dan digitalisasi pajak daerah
5. Demi mendukung potensi sumber daya baik sektoral, komoditas unggulan, maupun proyek Pemerintah Daerah, Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama Bappeda dan DMPTPSP melakukan penyusunan Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) dengan berdiskusi terkait iklim investasi di daerah yang sedang dan akan dikembangkan serta berpotensi untuk dibiayai melalui pinjaman daerah
6. Demi mendukung pemberdayaan serta penguatan peran UMKM terhadap perekonomian Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama dengan BLU PIP melaksanakan pendampingan ke Dinas Tenaga Kerja untuk dapat ikut mengawal Koperasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyalur langsung pembiayaan UMi

7. Dalam rangka mengetahui kondisi, tata kelola, dan jenis pembiayaan BLUD yang telah dilaksanakan Pemda, telah dilaksanakan koordinasi terkait rencana asistensi BLUD yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi
8. Untuk melaksanakan langkah – langkah strategis perbaikan nilai IKPA dalam kinerja pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan melibatkan seluruh satker dinas dalam wilayah Provinsi Jambi menyelenggarakan Workshop Pelaksanaan Anggaran yang menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait indicator dalam IKPA
9. ALCo atau *Asset and Liabilities Committee* Regional merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo di tingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat regional seperti informasi terkait APBN, APBD, Perpajakan, Bea Cukai dan Kekayaan Negara lingkup wilayah Provinsi Jambi yang menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi
10. Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pimpinan daerah, dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan negara di wilayah Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah mensinergikan FKPKN dengan TPID, TP2DD, TPPS, dan berpartisipasi dalam keterlibatan berbagai forum di daerah seperti Musrenbang RKPD. Di samping itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga melaksanakan kunjungan serta koordinasi dengan pimpinan daerah dalam wilayah Provinsi Jambi.

## REKOMENDASI

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara rutin triwulanan. Monitoring berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh satker untuk akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi agar segera dapat diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara daring agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti kegiatan dengan fleksibel dan tidak terbatas pada satuan kerja vertikal tetapi pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah
2. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ALCo Regional baik Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, *local expert* dan instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sehingga ALCo Regional yang disusun menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi



3. Membangun dan meningkatkan komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD termasuk dana TKD. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, baik Kanwil DJPb dan Pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pertukaran data untuk kepentingan analisis yang berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara
4. Membangun komunikasi dengan satker pusat yang berada di wilayah Jambi. Hal ini bertujuan agar Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan optimalisasi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) satker. Bagi satker, hal ini perlu karena bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan nilai IKPA
5. Melaksanakan fungsi *Financial Advisor* secara lebih intens dengan Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan penyaluran TKD. Semenjak tahun 2023 terdapat perubahan penyaluran yang semula, penyaluran hanya beberapa komponen TKD saja menjadi seluruh komponen TKD disalurkan melalui KPPN daerah. Terdapat juga perubahan terkait komponen DAU, yang sebelumnya bersifat *block grant*, berubah menjadi *block grant* dan *specific grant*. Sebagian besar penyaluran berdasarkan rekomendasi dari kantor pusat, sehingga sangat penting bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam meningkatkan komunikasi dengan Pemda supaya penyaluran TKD berjalan dengan lancar



## **Kanwil Ditjen Perbendaharaan** *Provinsi Jambi*

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Telanaipura, Kota Jambi, 36122  
Telp. (0741) - 668802 | Fax. (0741) - 668801  
Email: [kanwil.jambi@gmail.com](mailto:kanwil.jambi@gmail.com)  
Website: [djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi](http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi)